DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Aqib Burhannudin Rizqullah
145020107111015

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Aqib Burhannudin Rizqullah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: rizqullah21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan penanaman modal dalam negeri terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Metode analisis kuantitatif menggunakan regresi data panel. Data sekunder yang digunakan adalah 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2011-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan indeks pembangunan manusia dan penanaman modal dalam negeri tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: ketimpangan pendapatan, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, penanaman modal dalam negeri

---

A. PENDAHULUAN

Menumbuhkan masyarakat menjadi sejahtera adalah urgensi hal penting arah pembangunan ekonomi yang terdapat dalam misi pembangunan nasional. Lima proses pembangunan menuju negara maju menurut Rostow yakni pertama masyarakat masih kedaerahan, kedua persiapan pertumbuhan, ketiga tingginya laju pertumbuhan, keempat menuju modern dan terakhir masyarakat konsumtif dan sejahtera (Todaro & Smith, 2011). Pembangunan ekonomi akan dianggap berhasil apabila pertumbuhan ekonomi mampu seimbang dan tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah adalah salah satu masalah perekonomian Indonesia yang belum terselesaikan sampai sekarang. Sesuai dengan keadaan tersebut, dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antar daerah khususnya ketimpangan pengembangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan elemen pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal tersebut terlihat dari dominasi sumbangan PDRB KBI kepada PDB Indonesia yang sekitar delapan puluh persen. Diperlukan perubahan arah kebijakan pengembangan daerah yang mendorong percepatan pembangunan daerah KTI (Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) namun kesempatan bertumbuhnya daerah KBI (Jawa, Sumatera, dan Bali) masih terjaga. Dengan adanya dikotomi kawasan pembangunan semacam itu, seringkali terjadi pembagian atas dasar aspek daerah seperti Kawasan Barat Indonesia yang berasumsi daerah maju dan Kawasan Timur Indonesia daerah yang kurang bertumbuh atau masih terbelakang (Haris, 2007).

Indeks Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 0,355 atau turun 0,011 dari tahun 2011. Angka ini masih lebih tinggi daripada Indeks Gini Kawasan Barat Indonesia yang sebesar 0,343. Kurva Lorenz menunjukkan bahwa 10% penduduk Kawasan Timur Indonesia terbawah hanya menerima 4,3% dari pendapatan total, 20% penduduk terbawah menerima 9,7% dari pendapatan total, dan tingkat ketimpangan semakin naik ketika semakin dijauhinya garis diagonal oleh garis Lorenz melengkung.

Kawasan Barat Indonesia masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan sumbangan PDRB mencapai sekitar 80 persen. Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia dengan sumbangan yang rendah terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 20 persen. PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita adalah bagian parameter kemakmuran masyarakat suatu daerah yang selalu menjadi pengamatan penting. Setiap tahun Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kawasan Timur Indonesia selalu menikmati kenaikan, namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan menghitung kemakmuran masyarakat suatu daerah. Salah satu faktor penting dalam melakukan penelitian mengenai ketimpangan pendapatan antar daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (Owens, 1987). IPM Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011-2020. Kondisi

aksesibilitas geografis, budaya, dan ekonomi menjadi batasan bagi masyarakat Kawasan Timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Indonesia dengan jumlah total penduduk sejumlah 270 juta jiwa menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat dunia. Negara Indonesia mempunyai populasi usia produktif lebih tinggi dibanding usia non produktif, Indonesia memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar. Maka diperlukannya pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar banyak tenaga kerja yang bekerja. Tenaga kerja yang tidak mendapat lapangan pekerjaan disebut pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ialah salah satu aspek yang mendorong ketakseimbangan pendapatan pada suatu daerah. TPT Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan 1,12 poin dari tahun 2011 dan diikuti penurunan Indeks Gini sebesar 0,011 poin. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja dapat mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Kawasan Timur Indonesia.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman investasi yang akan merangsang kegiatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan output yang dihasilkan, dan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, harus diciptakan iklim investasi yang sehat. Penanaman Modal Dalam Negeri pada Kawasan Timur Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 79.793 miliar rupiah, dengan rata-rata Rp 4.987 miliar rupiah. Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp 25.934 miliar rupiah sebagai PMDN tertinggi pada Kawasan Timur Indonesia, nilai tersebut naik 19.365 miliar rupiah dibanding tahun 2011. Sedangkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 0,012 poin ke 0,335. Sehingga terdapat dugaan manfaat sebuah investasi tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sekitar 80 persen investasi domestik berada pada Kawasan Barat Indonesia, hanya sekitar 20 persen investasi domestik berada pada Kawasan Timur Indonesia. Salah satu faktornya ialah terlambatnya pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya kualitas serta kuantitas infrastruktur. Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, lantas judul dalam penelitian ini adalah **"Determinan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia".**

B. KAJIAN PUSTAKA

Distribusi Pendapatan

Pemberian sesuatu kepada pihak lain disebut distribusi, pendapatan adalah suatu penerimaan dari pihak lain atas kegiatan aktivitasnya. Distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan antara satu orang dengan orang lainnya dengan merata sehingga tidak beredar untuk beberapa golongan tertentu saja. Pembagian skala penghasilan atau bisa disebut distribusi pendapatan perorangan adalah parameter yang secara langsung untuk menghitung total pendapatan perorangan atau rumah tangga tanpa mempertimbangkan cara memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian pengelompokkan tersebut membagi total penduduk ke dalam sejumlah kelompok atau ukuran yang berbeda berdasarkan ukuran numerik, merupakan metode yang biasa digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan perorangan.

Penyaluran yang tidak seimbang dari penerimaan nasional oleh berbagai macam rumah tangga atau individu pada suatu daerah ataupun negara disebut ketimpangan pendapatan. Suatu gambaran yang menjelaskan selisih pembagian penghasilan individu atas keseimbangan ideal ialah Kurva Lorenz. Dalam menganalisis statistik penghasilan individu disuatu daerah dapat menggunakan Kurva Lorenz. Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah parameter nilai agregat ketakseimbangan penghasilan yang beredar berawal dari nol melambangkan keseimbangan ideal mecapai satu melambangkan ketakseimbangan.

Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menjelaskan pendanaan atau penanaman modal menentukan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pendanaan mempunyai peran membuat penghasilan dan memperbanyak daya tampung pembuatan barang dan jasa melalui pertambahan stok modal. Dalam menciptakan pertumbuhan yang baik maka diperlukan peningkatan pendanaan. Hal tersebut membutuhkan pertambahan penghasilan yang realistis secara berkesinambungan pada tingkat memadai akan menanggung pemakaian daya serap secara tepat atas bertumbuhnya stok modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perbandingan simpanan nasional dan perbandingan pendanaan atau produksi nasional. Berpengaruh secara langsung bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan rasio tabungan. Perekonomian agar bisa tumbuh lebih cepat dengan menambahkan tingkat tabungan atau *saving rate* dan meningkatkan teknologi. Tingkat tabungan dapat ditambah dengan cara intervensi pemerintah tanpa

mempertimbangkan harga dan memfasilitasi lembaga perantara seperti perbankan dan pasar modal (Jhingan, 2000).

Harrod-Domar menjelaskan ketentuan ekuilibrium agar terjadi kemajuan ekonomi dalam kurun waktu yang lama dan kokoh atau segenap peningkatan pembuatan produk ditampung oleh pasar dapat terlaksana bilamana:

$$\mathbf{g = k = n}$$

Keterangan:
G adalah pertambahan hasil
K adalah pertambahan kapital
N adalah pertambahan angkatan kerja

Instrumen pasar tidak ada campur tangan pemerintah menurut Harrod-Domar. Namun agar diperoleh ekuilibrium pada bidang permintaan dan penawaran barang maka pemerintah membutuhkan perencanaan pendanaan (Arsyad, 1999).

Kapasitas SDA dan SDM serta elemen penghasil sesuatu yang ada pada suatu daerah akan mempengaruhi PDRB yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Penyebab jumlah PDRB memiliki hasil yang berbeda-beda antar daerah adalah keterbatasan dalam penyediaan faktor produksi. Jumlah PDRB per kapita didapatkan pada pembagian PDRB harga konstan yang diproduksi pada tahun tertentu dengan jumlah masyarakat yang mendiami suatu daerah. Alat ukur kemakmuran suatu masyarakat menggunakan PDRB per kapita. Hipotesis kurva Kuznets U terbalik menjelaskan kaitan PDRB per kapita dengan ketimpangan pendapatan. Dalam jangka pendek ketika terjadi peningkatan PDRB per kapita akan diikuti kenaikan kesenjangan penghasilan. Dalam jangka panjang PDRB per kapita akan menurunkan kesenjangan penghasilan (Todaro & Smith, 2011).

Modal Manusia

Salah satu faktor penting dalam proses distribusi pendapatan adalah sumber daya manusia. Teori modal manusia menurut Schultz (1961) adalah kapital berwujud dan kemajuan teknologi memiliki kesamaan dalam bentuk manusia sebagai kapital atau modal. Kapasitas produksi manusia akan meningkat jika seseorang tersebut mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam asepek SDM. Ilmu yang benar dan kebugaran jasmani dapat meningkatkan pemahaman, kemahiran, dan kepakaran.

Beberapa aspek yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah kapabilitas sumber daya manusia antara lain kebugaran dan pengetahuan. Saat kapabilitas sumber daya manusia bertambah bakal diikuti penghasilan yang nantinya akan meningkatkan pengeluaran. Sehingga bertambahnya penghasilan akan memberikan efek pada ketimpangan pendapatan berkurang (Todaro & Smith, 2011).

Pengangguran

Keterkaitan pengangguran dengan ketimpangan pendapatan dapat dihubungkan melalui pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi atau PDRB maka persoalan pengangguran bisa berkurang, dan sebaliknya (Samuelson & Nordhaus, 2004). Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat dikurangi melalui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena saat tersebut perusahaan membutuhkan banyak tenga kerja. Pertambahan lowongan kerja yang lebih kecil dibanding pertambahan pekerja akan menyebabkan bertambahnya para pencari kerja yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan akan menghasilkan tingkat pengangguran terbuka (Sukirno, 2000).

Keterkaitan antara kemakmuran dengan tingkat pengangguran pada suatu daerah memiliki sifat bertentangan atau kontradiktif, ketika masyarakat suatu daerah banyak yang makmur maka pengangguran sedikit. Tingkat pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Saat tingkat pengangguran kecil maka masyarakat mempunyai pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan. Sehubungan peningkatan pendapatan selanjutnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan karena distribusi pendapatan merata (Sjafrizal, 2014).

Investasi

Aktivitas pertama dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah melakukan investasi. Pergerakan pendanaan akan menyebabkan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi, ketika penanaman modal sedikit akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Setiap negara berlomba-lomba menarik investor yang akan meningkatkan pendanaan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara (Dumairy, 1996).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah "kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (PT)."

Menurut penjelasan Harrod-Domar dalam teori invetasi atau penanaman modal bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus dibutuhkan pendanaan atau penanaman modal. Penanaman modal tersebut bisa didapatkan dari pengumpulan simpanan atau tabungan. Untuk menumbuhkan permintaan efektif pada masyarakat dapat menggunakan aktivitas pendanaan, karena aktivitas tersebut bisa membuat benda dan layanan agar perekonomian bertumbuh. Dengan adanya aktivitas pendanaan baru dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan waktu yang lebih panjang, pengaruh penanaman modal pada pertumbuhan ekonomi akan terlihat. Hal tersebut diperjelas dengan arus modal yang masuk akan menghasilkan barang ekonomi yang lebih banyak. Saat itu juga permintaan tenaga kerja akan meningkat karena pembukaan parbrik dan sejenisnya. Masyarakat yang sebelumnya menganggur akan mendapatkan penghasilan. Hal tersebut akan menghasilkan pemerataan pendapatan. Namun, kondisi tersebut tidak akan terjadi ketika investor menanamkan modalnya pada daerah tertentu saja, menyebabkan ketimpangan pendapatan (Arsyad, 1997).

Karakteristik tiap daerah memiliki perbedaan, sama halnya dengan sumber daya dan elemen produksi seperti pekerja, pendanaan, tanah, dan teknologi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Keadaan tersebut yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Saat penanaman modal meningkat, penghasilan masyarakat akan meningkat sehingga bisa menurunkan ketimpangan pendapatan (Yustika, 2002).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kuantitatif, karena dapat digunakan sebagai parameter pengukuran validitas terkait dengan teori pengetahuan memakai permasalahan dan perhitungan yang jelas. Serta menguji hipotesis penelitian menggunakan pengujian statistik.

Lokasi Penelitian

Penelitian berada di Kawasan Timur Indonesia yang mencakup Provinsi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (sekarang Papua). Pemilihan lokasi tersebut karena tingginya tingkat ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Gini pada tahun 2020 sebesar 0,355 bila dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia sebesar 0,343.

Variabel Dependen

Ketimpangan pendapatan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Indeks Gini dipakai menghitung tingkat ketimpangan pendapatan secara lengkap. Indeks Gini mempunyai nilai interval nol sampai satu. Ketika Indeks Gini mempunyai nilai nol menjelaskan pemerataan sempurna, sebaliknya ketika mempunyai nilai satu menjelaskan ketimpangan sempurna.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2011-2020 menjelaskan penghasilan rata-rata setiap masyarakat suatu daerah yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan seorang masyarakat bisa menikmati hasil pengembangan dalam bentuk seperti kebugaran, pengetahuan, dan penghasilan. IPM dihitung sebagai rerata geometrik dari indikator kebugaran, pengetahuan, dan pengeluaran.

Tingkat Pengangguran Terbuka menjelaskan persentase jumlah angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. TPT dihitung dengan jumlah pengangguran dibagi oleh jumlah angkatan kerja dikali seratus persen.

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri ialah aktivitas pendanaan dengan tujuan menjalankan bisnis di daerah negara Indonesia yang dijalankan oleh penanam kapital atau disebut investor dalam negeri dengan menggunakan kapital dalam negeri.

Data dan Sumber Data

Untuk menggambarkan pengaruh variabel PDRB Per Kapita, IPM, TPT, dan PMDN terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia maka penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya dan diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pihak lain. Disamping itu, data yang digunakan adalah data panel dimana gabungan dari data *cross-section* dan *time series*. Data *cross-section* yang digunakan adalah data 16 provinsi (provinsi yang sudah berdiri diatas 10 tahun) di Kawasan Timur Indonesia, sementara data *time series* yaitu rentang waktu data yang diteliti antara tahun 2011-2020. Data yang dimaksud meliputi data indeks gini, data PDRB Per Kapita, data IPM, data TPT, dan data PMDN. Data penelitian didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Penentuan Model

Model regresinya sebagai berikut:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBPK_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

IG	: Indeks Gini (persen)
PDRBPK	: PDRB Per Kapita ADHK 2010 (rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (persen)
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri (rupiah)
β_0	: Konstanta
β_1 β_2 β_3 β_4	: Koefisien regresi berganda
μ	: Variabel pengganggu

Metode Analisis Data

Analisis regresi data panel ialah metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Gabungan elemen dari data *time series* dan data *cross-section* disebut data panel (Gujarati & Porter, 2012). Pengolahan data menggunakan *statistic software* yaitu Eviews versi 11. Terdapat tiga cara yang dapat dipergunakan dalam model regresi data panel, yakni: *Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM),* dan *Random Effect Model (REM).*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Model Regresi Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model, model yang paling baik untuk diestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM).* Berikut adalah hasil estimasi model regresi panel tersebut:

Tabel 1: **Hasil Regresi Panel**

Variabel	Koefisien	Prob.
C	0,568696	0,0000
PDRBPK	-1,817001	0,0126
IPM	-0,172323	0,2628
TPT	0,048639	0,0057
PMDN	-0,003044	0,6311
R-Squared: 0,761748		
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000		

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IG = 0{,}568696 - 1{,}817001X_1 - 0{,}172323X_2 - 0{,}048639X_3 - 0{,}003044X_4 + E$$

Berdasarkan hasil Uji t (parsial) pada tabel 1 menyatakan jika dua variabel independen yakni IPM dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini pada Kawasan Timur Indonesia tahun 2011 sampai 2020. Dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia mempunyai nilai probabilitas 0,2628 dan Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki nilai probabilitas 0,6311 yang berada diatas nilai α = 5% (0,05). Sedangkan hasil yang berbeda diperoleh dua variabel independen lainnya yakni PDRB Per Kapita dan TPT berpengaruh signifikan dan berkoefisien negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini pada Kawasan Timur Indonesia tahun 2011 sampai 2020. Dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita mempunyai nilai probabilitas 0,0126 dan Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai nilai probabilitas 0,0057 yang berada dibawah nilai α = 5% (0,05).

Nilai koefisien variabel independen PDRB Per Kapita yaitu -1,817001. Variabel independen lainnya diasumsikan bernilai nol, maka setiap terjadi kenaikan sebesar 1 satuan pada Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita akan mengalami penurunan sebesar 1,817001 satuan pada Indeks Gini atau Ketimpangan Pendapatan Kawasan Timur Indonesia. Selanjutnya, variabel independen TPT mempunyai nilai koefisien yaitu -0,048639. Variabel independen yang lainnya diasumsikan bernilai nol, maka setiap terjadi kenaikan sebesar 1 satuan pada Tingkat Pengangguran Terbuka akan mengalami penurunan sebesar 0,048639 satuan pada Indeks Gini atau Ketimpangan Pendapatan Kawasan Timur Indonesia. Dan berhubung variabel independen seperti IPM dan PMDN tidak berpengaruh signifikan maka tidak perlu adanya penjelasan mengenai nilai koefisien.

Nilai koefisien determinasi atau biasa disebut R-Squared dari regresi data panel bernilai sebesar 0,761748. Nilai R-Squared tersebut dapat menjelaskan bahwa empat variabel independen yang terdiri dari PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penanaman Modal Dalam Negeri mampu menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia yang diukur dengan Indeks Gini sebesar 76,17%. Sedangkan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini menjelaskan sisanya yaitu sebesar 23,83%.

Nilai probabilitas dari hasil Uji F regresi data panel adalah sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari α = 5% (0,05), yang berarti bahwa empat variabel independen yang terdiri PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara bersamaan atau simultan telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia yang diukur dengan Indeks Gini.

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan

Kesimpulan analisis regresi memaparkan bahwa variabel independen PDRB Per Kapita terbukti berpengaruh negatif dan signifikan pada Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Keadaan tersebut menjelaskan bahwa semakin besar PDRB Per Kapita yang terjadi pada suatu provinsi di Kawasan Timur Indonesia maka akan mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada suatu provinsi di Kawasan Timur Indonesia dan sebaliknya.

Kawasan Timur Indonesia memiliki rata-rata PDRB Per Kapita sebesar Rp 33.494.000 dan nilai Indeks Gini sebesar 0,368. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai PDRB Per Kapita sebesar Rp 127.607.000 diatas rata-rata dan tertinggi serta nilai Indeks Gini 0,340 dibawah rata-rata Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan PDRB Per Kapita tertinggi karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Provinsi Papua Barat dan Papua masuk dalam kategori diatas rata-rata PDRB Per Kapita dan Indeks Gini Kawasan Timur Indonesia dengan nilai masing-masing sebesar Rp 60.170.000; Rp 40.982.000 dan 0,397; 0,410. Dengan jumlah PDRB Per Kapita yang tinggi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan ke kategori rendah.

Selain itu terdapat provinsi yang mempunyai PDRB Per Kapita dibawah rata-rata namun memiliki Indeks Gini diatas rata-tata Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Sektor unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan perlu pembenahan dalam hal produktivitas dengan penggunaan teknologi terbaru sehingga jumlah produksi akan meningkat. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendorong ketimpangan pendapatan ke kategori rendah. Terdapat delapan provinsi yang memiliki jumlah PDRB Per Kapita dan Indeks Gini dibawah rata-rata Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Maka diperlukan kemajuan teknologi dan masyarakat kreatif sehingga mutu dan hasil meningkat serta kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu mendorong sektor industri pengolahan agar jumlah PDRB meningkat yang akan diikuti peningkatan PDRB Per Kapita.

Hasil penelitian pada Kawasan Timur Indonesia sesuai dengan teori Kuznet dalam Todaro & Smith (2011) bahwa dalam jangka pendek ketimpangan pendapatan dan PDRB Per Kapita memiliki korelasi yang positif, ketika PDRB Per Kapita terjadi peningkatan maka akan diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun hubungan keduanya dalam jangka panjang memiliki korelasi yang negatif, dapat dilihat ketika PDRB Per Kapita Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun dalam sepuluh tahun terakhir dari Rp 28.631.000 di tahun 2011 ke Rp 36.502.000 di tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 7.871.000. Nilai Ketimpangan Pendapatan cenderung turun atau dalam tren turun dari 0,366 di tahun 2011 ke 0,355 ditahun 2020 atau turun sebesar 0,011.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan estimasi regresi menjelaskan bahwa variabel independen IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia bisa diperhatikan pada tabel 4.3 dalam tren kenaikan. IPM tertinggi dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 74.42. Rata-rata Indeks Pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebesar 66,59. Masih terdapat beberapa provinsi yang berada dibawah rata-rata antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat 65,45; Nusa Tenggara Timur 62,93; Kalimantan Barat 65,50; Gorontalo 66,16; Sulawesi Barat 63,32; Maluku Utara 66,18; Papua Barat 62,29; dan Papua 57,93.

Dalam sepuluh tahun terakhir umur harapan hidup saat lahir Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,53 poin (dari 67,12 pada tahun 2011 ke 68,65 tahun 2020). Hal tersebut menjelaskan bahwa bayi masyarakat Kawasan Timur Indonesia yang lahir mempunyai harapan hidup semakin meningkat dan sehat. Namun masih terdapat sepuluh daerah yang mempunyai umur harapan hidup dibawah rata-rata Kawasan Timur Indonesia.

Pada tahun 2011-2021 RLS Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan 1,05 menjadi 8,45 berarti bahwa masyarakat Kawasan Timur Indonesia yang berumur lebih dari dua puluh lima tahun rata-rata sudah menyelesaikan kelas delapan atau menempuh 8,45 tahun masa sekolah. Hal tersebut menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah karena masyarakat Kawasan Timur Indonesia rata-rata hanya lulus sekolah menengah pertama. Maka program pemerintah wajib belajar 12 perlu diawasi agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing ketika sudah lulus mencari kerja. Sedangkan HLS mengalami peningkatan 1,59 menjadi 13,07 berarti bahwa rata-rata anak usia tujuh tahun yang mulai menginjak sekolah diprediksi dapat bersekolah sampai tamat SMA atau hingga 13,07 tahun.

Pengeluaran per kapita Kawasan Timur Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan Rp 1.287.000 menjadi sebesar Rp 9.583.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa terus membaiknya kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonensia. Namun masih terdapat daerah yang tertinggal atau dibawah rata-rata Kawasan Timur Indonesia. Menurut Todaro & Smith (2011) bahwa mutu sebuah sumber daya manusia sebagaimana pendidikan dan kesehatan menjadi aspek yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Pendapatan per kapita disebuah daerah meningkat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia itu sendiri. Kenaikan pendapatan pada suatu daerah tersebut akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Diperlukan perbaikan khususnya pada aspek sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar daerah yang tertinggal atau dibawah rata-rata Kawasan Timur Indonesia bisa mengejar ketertinggalan sehingga dapat mengurangi Ketimpangan Pendapatan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan prediksi regresi menjelaskan jika adanya pengaruh negatif dan signifikan dari variabel independen Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Pada Kawasan Timur Indonesia tingkat pengangguran terbuka terbesar berada di Provinsi Maluku sebesar 8,64 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka di perkotaan lebih banyak dari perdesaan dan kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi terendah tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91 persen.

Pada Kawasan Timur Indonesia, sektor informal masih mendominasi dalam menyerap angkatan kerja dibandingkan sektor formal. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya beberapa provinsi mempunyai sumber daya manusia yang rendah.

Pekerjaan formal biasanya memiliki masa depan atau prospek yang lebih terjamin. Sementara pekerjaan informal identik dengan upah yang rendah dan perlindungan ketenagakerjaan yang kurang. Tetapi, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan formal membuat lapangan kerja infromal terus tumbuh. Sehingga tenaga kerja informal lebih dominan dibanding tenaga kerja formal.

Mayoritas masyarakat Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2020 bekerja pada sektor informal dengan persentase 64,90 atau 16.563.975 orang. Sedangkan masyarakat yang bekerja pada sektor formal berjumlah 8.958.328 atau 35,10 persen. Total orang yang bekerja pada Kawasan Timur Indonesia sebesar 25.522.303 orang. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki persentase diatas rata-rata Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat 73,47; Nusa Tenggara Timur 76,10; Sulawesi Tengah 67,37; Sulawesi Barat 72,63; Maluku 66,56; Maluku Utara 66,13; dan Papua 79,92.

Rata-rata upah tenaga kerja sektor formal Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 2.759.695, sedangkan rata-rata upah tenaga kerja sektor informal hanya sebesar Rp 1.628.838. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Kawasan Timur Indonesia berada pada kelas perekonomian rendah. Pendapatan masyarakat Kawasan Timur Indonesia yang rendah atau dibawah rata-rata bisa dikatakan sama dengan pengangguran. Jika mengacu pada hasil penelitian ini bahwa pengangguran turun menghasilkan pemerataan, pemerataan disini bukanlah pemerataan yang diharapkan karena pemerataan pendapatan kelas perekonomian rendah tidak menyebabkan kesejahteraan masyarakat. Dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir masih stagnan sekitar 6,4 juta jiwa.

Oleh karena itu ketika pengangguran menurun maka tingkat ketimpangan pendapatan meningkat karena orang yang bekerja mempunyai penghasilan rendah atau setara dengan pengangguran. Sedangkan saat pengangguran naik maka ketimpangan pendapatan turun karena masyarakat Kawasan Timur Indonesia mempunyai pendapatan dari bantuan sosial seperti kartu prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung tunai UMKM, program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan sosial tunai. Namun bantuan sosial tersebut hanya sementara karena dalam jangka panjang maka hal tersebut menjadi beban negara. Masyarakat Kawasan Timur Indonesia diharapkan mendapat pengahasilan yang layak. Sehingga pengangguran tidak lagi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan melainkan berpengaruh positif.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berlandaskan hasil estimasi regresi menjelaskan bahwa variabel independen Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Sekitar 80 persen investasi domestik berada pada Kawasan Barat Indonesia. Hanya sekitar 20 persen investasi domestik berada pada Kawasan Timur Indonesia, dari data tersebut sudah menjelaskan terjadi ketimpangan distribusi PMDN di Indonesia.

Rata-rata Penanaman Modal Dalam Negeri Kawasan Timur Indonesia sebesar 3 triliun tiap provinsi. Selanjutnya jika dilihat pada Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah PMDN sebesar 49 triliun rupiah, 63 persen PMDN berada di pulau Kalimantan dan 37 persen sisanya dibagi 12 provinsi. Keduabelas provinsi tersebut antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,3 triliun; Nusa Tenggara Timur 1,4 triliun; Sulawesi Utara 2,3 triliun, Sulawesi Tengah 2,6 triliun; Sulawesi Selatan 4,4 triliun; Sulawesi Tenggara 1,8 triliun; Gorontalo 769 miliar; Sulawesi Barat 825 miliar; Maluku 184 miliar; Maluku Utara 643 miliar; Papua Barat 299 miliar; dan Papua 838 miliar. Oleh sebab itu, Ketimpangan Pendapatan Kawasan Timur Indonesia tidak dipengaruhi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri dikarenakan masih terpusatnya investasi di beberapa daerah saja sehingga daerah lain yang mempunyai nilai investasi yang kecil kurang menerima manfaatnya. Padahal investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri adalah salah satu pendorong laju pertumbuhan PDRB yang menghasilkan kenaikan PDRB Per Kapita, dan pada akhirnya akan mempengaruhi penurunan Ketimpangan Pendapatan. Maka dari itu potensi sumber daya alam tiap daerah yang berbeda-beda perlu dimaksimalkan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya karena mendapat imbal hasil yang memuaskan.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang memperlihatkan jika PDRB Per Kapita dan TPT mempunyai dampak negatif dan signifikan, IPM dan PMDN tidak berefek signifikan pada Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Maka hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi kepada Kawasan Timur Indonesia yaitu PDRB Per Kapita melambangkan kemakmuran ekonomi masyarakat yang digunakan acuan pemerintah untuk menentukan arah strategi pengembangan daerah tertinggal. Diperlukan investor baru yang mau berinvestasi pada daerah tertinggal yang menandakan mempunyai PDRB Per Kapita dibawah rata-rata. Agar sektor potensial yang dimiliki daerah tersebut dapat mendorong laju pertumbuhan PDRB diikuti peningkatan PDRB Per Kapita. Hingga pada akhirnya distribusi pendapatan daerah tersebut merata.

Pembangunan infrastruktur bertujuan agar satu daerah dengan daerah lainnya dapat terkoneksi. Hal tersebut diharapkan mengatasi masalah selama ini tentang masalah geografis yang menyebabkan sebuah daerah memiliki indeks pembangunan manusia rendah. Aksesibilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi harapan untuk meningkatkan pendapatan yang otomatis akan meningkatkan pengeluaran per kapita. Sehingga diharapkan ketika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi penurunan Ketimpangan Pendapatan.

Dalam mengatasi permasalahan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah dapat melakukan pembukaan lapangan pekerjaan pada sektor formal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan terlebih untuk menghadapi revolusi industri 4.0 sehingga dapat bekerja pada sektor formal. Serta peningkatan upah minimum provinsi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonesia.

Terkait investasi, perlu perhatian serius oleh pemerintah karena Kawasan Timur Indonesia terjadi ketimpangan investasi yang lebar. PMDN hanya berfokus pada daerah tertentu saja yang menyebabkan daerah lainnya mengalami ketertinggalan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut membantu mengembangkan potensi daerah seperti SDA, SDM, dan keunggulan daerah tersebut serta dapat mengurangi daerah tertinggal. Sehingga Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia bisa diturunkan melalui aktivitas pendanaan yang tepat sasaran.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah PDRB Per Kapita mempengaruhi secara negatif dan signifikan pada Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan PDRB Per Kapita pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan dalam tren kenaikan. Sedangkan Indeks Gini pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi namun dalam tren penurunan. Indeks Pembangunan Manusia tidak mempengaruhi secara signifikan pada Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya daerah tertinggal yang memiliki nilai dibawah rata-rata Kawasan Timur Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa orang yang bekerja pada Kawasan Timur Indonesia menyebabkan pemerataan pada kelas perekonomian rendah karena bekerja pada sektor informal. Penananman Modal Dalam Negeri tidak memberikan dampak signifikan pada Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Keadaan tersebut disebabkan oleh ketimpangan distribusi PMDN karena 63 persen investasi berada di pulau Kalimantan. Sedangkan 37 persen lainnya dibagi 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah Ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia dapat berkurang seiring dengan peningkatan PDRB Per Kapita. Maka dari itu, diharapkan adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan PDRB Per Kapita. Misalnya dengan mendorong perkembangan industri pengolahan atau manufaktur pada daerah tertinggal atau dibawah rata-rata, namun tetap menjaga pertumbuhan daerah diatas rata-rata. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonesia akan meningkat.

Kawasan Timur Indonesia memerlukan pembangunan infrastrukur transportasi yang memadai sebagai alat konektivitas antar daerah, jaringan listrik, sarana dan prasaran lainnya. Serta tenaga ahli pada bidang pendidikan dan kesehatan terutama daerah tertinggal atau dibawah rata-rata. Sehingga aksesibilitas pendidikan dan kesehatan dapat tercapai.

Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti penerapan sekolah 12 tahun dan mengadakan pelatihan sesuai minat. Serta membuka lapangan pekerjaan formal seperti industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan.

Agar penanaman modal dalam negeri tidak hanya berkonsentrasi pada Pulau Kalimantan, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk menarik investor mau menanamkan modalnya di daerah yang kekurangan modal dengan cara mempermudah dan kejelasan perizinan, pembangunan akses infrastruktur, meningkatkan keamanan, kemudahan akses lahan, dan memetakan potensi sumber daya alam daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan.* Edisi Ketiga. *Yogyakarta: Badan Penerbitan STIE YPKN*.

Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE)*.

Dumairy, D. (1996). *Perekonomian Indonesia*. *Jakarta: Erlangga*.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. *Jakarta: Salemba Empat*.

Haris, S. (2007). *Decentralization and Regional Autonomy (Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. *Jakarta: LIPI*.

Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (Terj)*. *Jakarta: PT Rajawali*.

Owens, R. (1987). *Organiational Behavior in Education*. New Jersey: Prantice Hall. *Inc Engle Wood Cliffs*.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. *Jakarta: Media Global Edukasi*.

Schultz, T. W. (1961). *Investment in human capital. The American Economic Review*, *51*(1), 1–17.

Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.

Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan, Edisi Sebelas, Jilid 1 dan 2. *Jakarta: PT Erlangga*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Diakses dari: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM

Yustika, A. E. (2002). *Pembangunan Dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia*.